

# LAPORAN KINERJA

(LKj)



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**TAHUN 2022**

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 sebagaimana ditetapkan dengan perda 19/2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya ditetapkan dengan Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor:Perbub No...../2018

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021.

Wamena, February 2022

Kepala,



TENUS. GOMBO, S.Pd. M.Pd  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19720804 200111 1 001

## Ikhtisar Eksekutif

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 telah berpedoman kepada perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan ([perda nomor 03/2016](#)) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018–2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor [Perbup No...../2018](#)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : ([perda 3 tahun 2016](#)) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Kabupaten Jayawijaya Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 3

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua (2) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100 %. Ada dua (2 ) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (89.76 % lebih), meliputi :

1. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemilu dan pelpres tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat kita dalam berdemokrasi sangat tinggi ini dibuktikan dengan hasil perhitungan kita, bahwa partisipasi masyarakat sebesar 86.77 %

2. Kondusifitas Masyarakat yang stabil.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya

perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai, ini dapat kita ukur dari capaian program kegiatan Badan Kesbangpol dalam pencapaian kondusifitas masyarakat yang stabil sebesar 85,77 %.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	
Ikhtisar Eksekutif .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi.....	
D. Keragaman SDM .....	
E. Isu Strategis .....	
Bab II Perencanaan Kinerja .....	
A. Rencana Strategis .....	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan Sasaran .....	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 .....	
1. Sasaran .....	
2. Sasaran .....	
3. Sasaran .....	
4. Sasaran .....	
B. Realisasi Anggaran.....	
Bab IV Penutup .....	



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah /publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (Performance Plan) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2020 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) untuk tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang meliputi masalah sosial dan politik.

## **B. Pembentukan OPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- c. Pembinaan dan pengendalian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan lingkungan kantor dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut : Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Dari gambaran diatas, jelas bahwa tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah melaksanakan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sedangkan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- a. Penyusunan rencana dan program pembinaan Kesatuan Bangsa.
- b. Perumusan kebijakan dibidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Perumusan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- e. Perumusan kebijakan di bidang Politik.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional

- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- f. Bidang Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **D. Keragaman SDM**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya tersusun dalam kelompok jabatan struktural yaitu satu Sekretariat dan Empat Bidang, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
- d. Bidang Politik

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II : 1 orang
- b. Eselon III : 5 orang
- c. Eselon IV : 11 orang
- d. Staf : 6 orang

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jayawijaya  
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase	Keterangan
1	SD	-	1,65 %	
2	SLTP	1	1,65 %	
3	SLTA	5	26,22 %	
4	D. III	-	1,65 %	
5	S. 1	14	55,73 %	
6	S. 2	2	2,65 %	
	<b>J u m l a h</b>	<b>22</b>	<b>100 %</b>	

Sumber : Badan Kesbangpol.

## E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi dan berbagai aspek pembangunan dan upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai

Penentuan isu startegis menjadi bagian penting bagi keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023 karena dari tahapan ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Kantor beserta jajarannya selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal – hal yang telah dikemukakan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya menetapkan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan.
2. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
3. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
4. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
5. Terwujudnya Masyarakat yang kondusif menjadi modal utama terciptanya masyarakat yang Stabil.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Visi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”.***

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang wawasan kebangsaan, pendidikan politik, keamanan dan ketertiban.

#### 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya.

#### Prioritas dan Sasaran BKBP Kabupaten Jayawijaya

NO	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan	Meningkatnya	Persentase	ASN BKBP	Tersedia

	Tata Kelola Pemerintah	kapasitas dan kualitas SDM ASN	ASN yang mengikuti diklat profesi tertentu		sumber daya asn yang baik
2		Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Nilai Sakip	ASN BKBP	
3	Pelayanan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan Ketertiban Umum dan Linmas	Pengawasan dan Pembinaan aktif kepada seluruh lapisan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat terhadap sadar hukum	masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan Aparatur Pemerintah;	Masyarakat yang sadar hukum

**Tujuan BKBP  
Kabupaten Jayawijaya**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target indikator Tahun 2022
1	2	3	4
	Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	8,00

**Sasaran BKBP  
Kabupaten Jayawijaya**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target indikator Tahun 2022
1	2	3	4
	Meningkatkan Penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Masyarakat	8,00

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi konflik sosial
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama BKBP  
Kabupaten Jayawijaya**

No	IKU/ Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi wawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air	Prosentase peserta yang memahami ideologi wasbang, bela Negara dan cinta tanah air	78,55	80.00	81.50	83.00	85.00
2.			72.00	72.85	73.00	73.50	74.00

	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewaspadaan nasional di daerah	Prosentase penurunan konflik SARA					
3.	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Prosentase penurunan jumlah tindak kriminalitas di daerah	50.39	60.79	70.50	70.79	80.00
4.	Meningkatnya pemahaman ketahanan masyarakat akan pentingnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	Prosentase jumlah ORMAS/LSM yang memiliki SKT	80.00	87.14	90.00	90.50	91.00

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023.

Sejak tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [jayawijayakab.go.id](http://jayawijayakab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.**

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

#### Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Program Pendidikan Politik Masyarakat
2.	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Program pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas dan evaluasi
		Program kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai berikut :

#### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	75	86.77	86.77
2	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	2	98

Sumber : Kantor Kesbangpol.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, dengan rata-rata capaian sebesar 89.76%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masuk kriteria sangatnya tinggi adalah indikator Jumlah intoleransi di masyarakat dengan realisasi dua (dua) yaitu al:

1. Kasus perang suku yang menyebabkan keamanan, kenyamanan terganggu.
2. Makin meningkatnya angka criminal berupa begal, rampok, pencurian, yang meresahkan masyarakat.

hal ini berarti wilayah Kabupaten Jayawijaya masih perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam hal pembinaan Intoleransi di masyarakat.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) prosentase pemilih yang berpartisipasi dapat melebihi target yang kita rencanakan sehingga hasilnya sangat memuaskan.

#### Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

- 1. Sasaran** meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk selalu memperbaiki pelayanan.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini didukung dengan program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya pendidikan politik dan berorganisasi bagi masyarakat agar masyarakat sadar dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik di Kabupaten Jayawijaya. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan meningkatnya partisipasi politik serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Adapun sasarannya adalah

1. Tersedianya data ormas, orsos, LSM
2. Meningkatnya partisipasi politik
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
4. Terasilitasinya Partai Politik dalam pencairan dana bantuan keuangan
5. Tertib administrasi pengurus Partai Politik
6. Pendidikan demokrasi bagi generasi muda

## Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

### Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	-	75	86.77	86.77	75 %	

Sumber : Badan Kesbangpol

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama prosentase pemilih yang berpartisipasi tahun 2019 sudah melebihi target yang telah ditentukan ,ini merupakan sebuah capaian yang patut kita banggakan dan mudah-mudahan capaian yang akan datang juga lebih baik.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 75 %.

Indikator kinerja utama prosentase pemilih yang berpartisipasi tahun 2017 tidak ditargetkan karena tidak ada pemilihan umum. Namun kalau dilihat prosentase pemilih yang berpartisipasi pada pemilihan umum tahun 2014 dan pemilihan kepala daerah tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

#### Realisasi Prosentase pemilih yang berpartisipasi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase pemilih yang berpartisipasi	0	75	86.77	115,69	75 %	115,69

Sumber : Badan Kesbangpol

Berdasarkan hasil capaian pemilihan kepala daerah tahun 2018 sebesar 86.77 % ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan cukup tinggi. Hal tersebut tercapai dengan upaya Rapat pimpinan daerah membahas persiapan dan permasalahan Pemilu serta Sosialisasi Pemilu.

Permasalahan :

1. Pemahaman tentang arti penting dan regulasi tentang pemilu yang masih perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Sosialisasi dan dialog terkait dengan politik dan pemilu
2. Melakukan koordinasi dan sinergisitas kegiatan yang terkait dengan politik dan pemilu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Inkator Kinerja Utama Prosentase pemilih yang berpartisipasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- b. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kerja.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilpres pada tahun 2021 di targetkan sebesar 75 % dan ternyata mendapatkan respon dari masyarakat yang cukup tinggi sebesar 86.77 %.

Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

- a. Pendidikan politik di masyarakat
- b. Pendampingan ormas, orsos dan LSM

## 2. Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya selalu berupaya untuk dioptimalkan. Hal tersebut selain dari tuntutan regulasi peraturan perundangan juga sebagai wujud respon dan kepedulian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya untuk selalu memperbaiki pelayanan.

Program ini dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil.

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	2	98 %	0	99%

Sumber : Badan Kesbangpol

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 0, realisasi 2 tercapai 98% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Untuk Tahun 2021 ini angka Toleransi di Jayawijaya memang masih perlu mendapatkan perhatian dari kami ini dari target yang kita inginkan 0 tetapi masih ada dua (2) kasus yang terjadi dan ini menjadi perhatian kita semua untuk meningkatkan kinerja kita.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja utama Jumlah intoleransi di masyarakat adalah 2 kejadian, ini menunjukkan bahwa kondisi di wilayah Kabupaten Jayawijaya masih dalam koridor yang stabil dan perlu ditingkatkan kewaspadaan kita agar lebih kondusif. Hal ini tercapai melalui dengan koordinasi di tingkat pimpinan, peningkatan kewaspadaan dini masyarakat serta peningkatan dialog tokoh umat beragama.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 0. :

Permasalahan :

1. Isu agama dan sara yang rentan memicu konflik.

Solusi :

1. Dialog tokoh agama dan tokoh masyarakat beserta dengan pemerintah untuk membahas kondisi kerukunan.
2. Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui FKUB dan FPK sampai di tingkat Kecamatan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama Jumlah intoleransi di masyarakat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1, Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama gedung Kantor dan peralatan Gedung Kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik;
3. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran . Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil , program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase FKUB aktif pada tahun 2021 mentargetkan 85 % terealisasi dengan capaian sebesar 100%, program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan yaitu ;

- a. Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis
- b. Pemantauan orang asing.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun 2021 mentargetkan 100 % terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ;

a. Pendidikan Wawasan Kebangsaan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keteriban dan Keamanan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Prosentase FKDM tingkat Kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan 100 % terealisasi sebesar 14 Kecamatan dengan capaian sebesar 100 %. Program ini di dukung dengan 2 (dua) Kegiatan, yaitu ;

a. Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

b. Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan.

Selain program pendukung sasaran ada 2 (dua) program rutin yang masuk dalam Belanja Langsung Pendukung yang di ampu oleh Sekretaris yang terkait dengan operasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijya. Program ini bersifat *supporting* dari tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2021 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 52.28 % dengan capaian sebesar 75.19 % Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jayawijaya. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2021 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 90.75%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 80 sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar

10%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang menargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 80%. Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu ;

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

## **B. Realisasi Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp 3.529.013.224 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Belanja Hibah dan Belanja Modal. Dengan Realisasi Belanja Tidak langsung sebesar Rp 1.539.171.282; dan Belanja Langsung sebesar Rp 779.890.000, Belanja Hibah sebesar Rp 1.165.809.942 Belanja Modal sebesar Rp 44.142.000 atau sebesar 79.99 %.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023. Secara umum realisasi masing-masing IKU tidak tercapai sesuai dengan target, atau rata-rata tercapai sebesar < 75 % atau kinerja kriteria **Sedang**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 tidak dipenuhi sesuai dengan harapan karena masih dalam situasi Covid. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.